



RESEARCH ARTICLE

Performance of the Environmental and Forestry Office through the 'Zero Waste' Program in Polewali Mandar Regency, West Sulawesi Province

Ayu Achriany Sopian¹, Dwi Agus Sumarno¹, Herson Simbolon¹

Abstract

The amount of waste generated in Polewali Mandar Regency in 2022 was 2,852,712 tons from a population of 488,857, indicating that the waste management by the Department of Environment and Forestry, which is responsible for waste issues in Polewali Mandar Regency, is not yet optimal. Meanwhile, Government Regulation No. 97 of 2017 Article 5 paragraph 1 concerning the National Strategy Policy for Household Waste Management and Similar Household Waste targets a waste generation rate of 30%. Therefore, this research aims to identify and describe the performance of the DLHK through the Zero Waste program, the inhibiting factors, and the efforts in waste management in Polewali Mandar Regency. This thesis research uses qualitative descriptive research with an inductive approach. The data collection techniques used by the researcher are interviews, observations, and documentation. The data analysis techniques used in this thesis research consist of data reduction, data presentation, and conclusion drawing or verification. According to Soesilo's theory (Nogi, 2005), the results of this study conclude that in waste management, the performance of the DLHK through the "Zero Waste" Program has made a positive contribution to maintaining cleanliness. However, the limitations of the study include: first, the research only uses a qualitative approach with interview techniques, which are not yet able to predict which dimensions and indicators most influence the measurement of the performance of the Department of Environment and Forestry through the "Zero Waste" program in Polewali Mandar Regency, West Sulawesi Province. Second, the limitation of data collection time and the interviews conducted are subjective, depending on the informants' memory and perceptions, which affects the accuracy and reliability of the data. Third, this study has not explained other factors influencing performance, such as the role of regional leadership like sub-district heads and village heads, which are indicated to play a role in taking over these tasks and responsibilities..

Keywords: Performance, Waste Management, waste generation.

Introduction

Permasalahan sampah merupakan salah satu permasalahan lingkungan hidup yang seringkali menjadi sorotan dalam masyarakat dan berdampak pada kerusakan lingkungan. Namun implikasi dari permasalahan sampah bukan hanya sekedar masalah lingkungan, tetapi juga terhadap peningkatan jumlah penduduk, pertumbuhan ekonomi dan industri, urbanisasi yang cukup luas dan kenaikan standar hidup masyarakat sehingga telah mempercepat adanya penumpukan sampah. Dapat dilihat jumlah timbulan sampah sebagaimana table 1 timbulan sampah di Indonesia sebagai berikut:

Tabel 1

Timbulan sampah di Indonesia

No	Tahun	Jumlah Penduduk (Juta Jiwa)	Timbulan Sampah (ton)	Jumlah Penanganan Sampah
	2019	270.6	29.140.000	67,3%
	2020	270,2	32.820.000	70,8%
	2021	272,6	21.880.000	65,9%
	2022	275,7	35,421,817	75,2%

Sumber: Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional Tahun 2019-2022

Menurut Undang-Undang nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dimana pemerintah bertanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan dan menempatkan masyarakat sebagai unsur utama

dalam upaya penanggulangan sampah di lingkungan masing-masing dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 33 tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah. Pada pasal 3 Permendagri Nomor 33 tahun 2010 yang termaktub "Pemerintah daerah dalam mengurangi sampah dilakukan dengan cara pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah, dan/atau pemanfaatan kembali sampah", menunjukkan betapa pentingnya peran Pemerintah Daerah dalam mengurangi jumlah sampah dan mengelola tumpukan sampah menjadi sumber daya yang bermanfaat.

Sulawesi Barat memiliki 6 (enam) kabupaten yaitu Kabupaten Mamuju yang merupakan ibukota provinsi Sulawesi Barat, Kabupaten Mamasa, Kabupaten Polewali Mandar, Kabupaten Mamuju Tengah, Kabupaten Mamuju Utara dan Kabupaten Majene. Masyarakat Sulawesi Barat dalam mengelola sampah masih sangat terbatas dan kurang partisipasinya. Ini dibuktikan dengan sebagian besar masyarakat menjadikan sungai dan pantai sebagai tempat pembuangan sampah yang paling praktis. Akibatnya terjadi pencemaran air dan menimbulkan banjir pada musim hujan. Selain sampah rumah tangga dan juga sampah yang berasal dari aktivitas kegiatan pada Kawasan tertentu di Sulawesi Barat belum dikelola secara maksimal sehingga menimbulkan timbulan sampah yang sangat mengganggu terhadap lingkungan. Berikut gambar 1 timbulan sampah yang di hasilkan oleh Provinsi Sulawesi Barat ton/tahun:

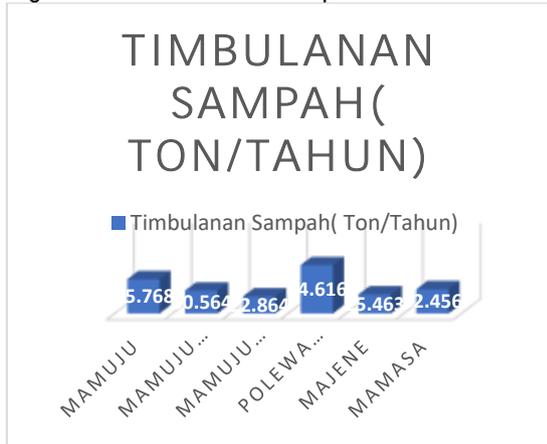
Institut Pemerintahan Dalam Negeri

*) *corresponding author*

Dwi Agus Sumarno

Email: dwi141263@ipdn.ac.id

Fig 1. Timbulan Sampah Sulawesi Barat 2021



Sumber: DLHK Prov. Sulawesi Barat 2021

Dari data diatas, bahwa Kabupaten Polewali Mandar merupakan penghasil sampah terbanyak di Sulawesi Barat dengan timbulan sampah sebanyak 64,616 ton per tahun. Berdasarkan LAKIP DLHK Kabupaten Polewali Mandar tahun 2021, target proporsi sampah yang tertangani sebesar 75,03% sedangkan realisasinya sebesar 67,73% atau hanya sebesar 21.424 ton/tahun. Bertambahnya jumlah penduduk berbanding lurus dengan bertambahnya jumlah timbulan sampah. Hal ini juga terjadi di Kabupaten Polewali Mandar yang dapat dilihat pada tabel 2 seperti di bawah ini.

No	Data	Tahun			
		2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Penduduk (Jiwa)	442,576,00	478,534,00	483,920,00	488,857,00
2	Timbulan Sampah M3/tahun	2,394,492	2,402,820	2,791,020	2,852,712
3	Jumlah Sampah Individual M3/tahun	5,41	5,02	5,7	5,8
4	Jumlah Penanganan Sampah	44%	40%	32%	31%

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Polewali Mandar

Kabupaten Polewali Mandar menghasilkan sampah 2,852,712 ton/tahun dan hanya 31% sampah saja yang mampu di kelola oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Polewali Mandar. Pertumbuhan penduduk yang tinggi, mengakibatkan peningkatan timbulan sampah setiap tahunnya mulai dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 ini. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran dan partisipasi masyarakat masih jauh dari yang diharapkan. Disamping itu sarana dan prasarana pengelolaan sampah belum tersedia sebagaimana kebutuhan dan produk sampah yang ada. Hal tersebut tentunya memerlukan peran dari pemerintah khususnya Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Polewali Mandar.

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Polewali Mandar memiliki program "Zero Sampah" yang merupakan salah satu program dari bank sampah di Kabupaten Polewali Mandar. Adapun cara pelaksanaannya menukar sampah daur ulang dengan Sembilan bahan pokok (sembako) guna mengurangi sampah yang ada di Kabupaten Polewali Mandar. Program ini dilaksanakan mulai bulan Mei 2023 sesuai dengan perubahan RPJMD Kabupaten Polewali Mandar tahun 2019-2024 dengan salah satu misi RPJMD yaitu " Mengembangkan infrastruktur berkualitas dan terintegrasi dengan berwawasan lingkungan", dan dijabarkan lebih lanjut pada tujuan dan sasaran yang ada dalam Rencana Strategis (Renstra) yaitu meningkatkan kualitas lingkungan hidup.

Dikutip dari berita online Beritasatu Polewali Mandar Pit Kadis DLHK Polman, Agusnia Hasan Sulur menjelaskan bahwa

Program ini merupakan sebagai salah satu bentuk upaya pemerintah untuk meminimalisir terjadinya penumpukan sampah yang akan bernilai ekonomis dan baru direalisasikan pada bulan Mei 2023. Melalui proses pemisahan sampah rumah tangga yang beragam untuk dibungkus oleh warga dan lalu di bawa ke kantor DLHK yang berada di Jl Kartini, Kelurahan Pekkabata Kecamatan Polewali untuk kemudian diterima dan ditimbang oleh petugas Bank Sampah Sipamandaq Polman (Asyharuddin, 2023). Program dari bank sampah dibawah naungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan ini menarik antusias warga untuk menumbuhkan efek ekonomi yaitu menukarkan sampahnya dengan berbagai kebutuhan pokok seperti beras, minyak, gula hingga rokok yang dapat ditukarkan langsung di bank sampah DLHK.

Method

Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif serta pendekatan induktif karena dianggap tepat untuk digunakan dalam pengamatan ini. Hal ini dikarenakan dalam proses penelitian peneliti melakukan tinjauan terhadap fakta dan data yang ada di lapangan kemudian melakukan pendeskripsian atau menggambarkan secara sistematis aktual dan akurat sehingga akan dapat ditarik kesimpulan yang bersifat umum mengenai Kinerja yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Polewali Mandar mengenai pengolahan sampah di Kabupaten Polewali Mandar melalui program "Zero Sampah" dengan harapan akan dapat memberikan solusi yang bermanfaat bagi kebersihan lingkungan di Kabupaten Polewali Mandar.

Dalam pelaksanaan penelitian penulis menggunakan teori kinerja menurut Soesilo dalam (Nogi, 2005) sebagai pisau analisis yang terdiri dari 5 dimensi yaitu organisasi, kebijakan, Sumber Daya Manusia (SDM), Sistem Informasi Manajemen, dan sarana prasarana. Dalam pengumpulan data penulis menggunakan sumber data primer yaitu wawancara serta data sekunder yaitu dokumen dan sumber lain yang bersumber dari internet yang mengenai lingkungan hidup permasalahan pengelolaan sampah.

Results

Untuk mengetahui kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Polewali Mandar dalam pengelolaan sampah peneliti meninjaunya dari teori menurut Soesilo dalam (Nogi, 2005) yang terdiri dari beberapa dimensi yakni:

Organisasi

Dalam organisasi, salah satu kriteria yang penting ditunjukkan melalui rumusan indikator yang mampu mencerminkan apa yang menjadi tujuan, sasaran, dan strategi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Polewali Mandar menunjukkan bahwa DLHK Kabupaten Polman sendiri memiliki tujuan utama yaitu berkurangnya timbulan sampah. agar kedepannya terarah serta dapat menjalankan tugas dan fungsi yang diberikan kepada masing masing pegawai termasuk dala hal pengelolaan sampah. Menciptakan daerah yang bersih serta tidak ada lagi penumpukan di bahu jalan atau di pinggir sungai maupun jembatan. Dalam hal ini khususnya melaksanakan pengawasan dan menegakkan hukum bagi yang melakukan pelanggaran, melakukan kegiatan rehabilitasi, meningkatkan kesadaran masyarakat, memanfaatkan sumber daya, meningkatkan kualitas dan layanan mengenai lingkungan dan pengelolaan sampah dan sudah ada beberapa layanan mengenai lingkungan yang kami berikan kepada masyarakat salah satunya program bank sampah yaitu Zero Sampah yang baru kami, yang mana kami memberikan nama yang menarik untuk program tersebut agar para masyarakat tertarik dengan program pengelolaan sampah.

Sejalan dengan hal tersebut, Wakil Ketua III DPRD Kabupaten Polewali Mandar menyatakan bahwa dalam menjalankan tugas dlhk, kami terus mengawasi masalah sampah, terutama setelah

penutupan tpa di desa amola pada tahun 2021 yang menyebabkan sampah menumpuk di polewali. kami berharap dengan adanya program baru yang diimplementasikan, tidak akan ada lagi penumpukan sampah di bahu jalan, pinggiran sungai, atau jembatan. kami akan secara khusus melaksanakan pengawasan dan menegakkan hukum bagi pelanggar yang melakukan tindakan tersebut. dan kami akan bekerja sama dengan pemerintah setempat serta masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya pengelolaan sampah yang bertanggung jawab.

Dari hasil wawancara yang dilakukan dan sesuai dengan observasi yang telah dilakukan maka dapat menarik dikatakan bahwa untuk mengurangi timbulan sampah yang ada dinas lingkungan hidup dan kehutanan kabupaten polewali mandar haruslah lebih teliti dalam melakukan pengawasan dan sosialisasi kepada masyarakat guna meningkatkan kesadaran diri dari masyarakat betapa pentingnya pengelolaan sampah yang baikkebijakan yang memiliki indikator visi dan misi organisasi.

Indikator kedua dalam dimensi organisasi yaitu sasaran. sasaran yang ingin dicapai dinas lingkungan hidup dan kehutanan dalam pengelolaan sampah di kabupaten polewali mandar yakni meningkatnya kualitas pengelolaan persampahan. dalam menjamin guna meningkatnya kualitas pengelolaan persampahan dinas lingkungan hidup dan kehutanan telah menjabarkan hal tersebut di renstra tahun 2019 – 2024 yang berlandaskan pada persentase penanganan persampahan yang dapat dilihat dari target dari tahun ke tahunnya. pada persentase penanganan persampahan tahun 2019 mencapai 73,09%, tahun 2020 mencapai 74%, tahun 2021 mencapai 75,03%, tahun 2022 mencapai 74,14 %, dan tahun 2023 mencapai 73,04% yang berarti mengalami penurunan dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 sebesar 1,99 %.

Hal ini sejalan dengan wawancara dengan Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Polewali Mandar Bapak Baktiar SSTP, yang mengatakan bahwa dalam mencapai pengelolaan sampah yang baik, pengelolaan sampah haruslah menyelenggarakan pengelolaan lingkungan, pengawasan, peningkatan SDM, memberikan informasi terkait lingkungan utamanya dalam hal pengelolaan sampah, dan lainnya. Dari hal-hal tersebut sangat diharapkan dapat mengubah lingkungan yang sehat. Program yang diberlakukan di Kabupaten Polewali Mandar dapat terselenggara dengan baik menciptakan Polman yang bersih, sehat, dan asri. Hal ini juga didukung oleh pemerintah pusat dan daerah yang sangat berperan aktif.

Dari hasil wawancara yang dilakukan dan sesuai dengan observasi yang telah dilakukan tersebut maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa dalam pencapaian sasaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Polewali Mandar telah berjalan dengan baik namun belum optimal yang dapat dilihat dari persentase penanganan persampahan dari tahun ke tahun terus menurun dikarenakan sampah yang di di tangani atau di kelola sudah banyak mengalami penurunan jadi tingkat pengelolaannya juga menurun yang hasil ini tidak terlepas dari penyelenggaraan pengelolaan lingkungan, pengawasan, dan peningkatan SDM yang dapat mengubah kualitas lingkungan menjadi lebih baik.

Indikator ketiga dalam dimensi organisasi yaitu strategi. Strategi adalah kumpulan langkah-langkah yang diambil untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Rumusan strategi selanjutnya akan menentukan cara sasaran pembangunan akan dicapai melalui berbagai garis kebijakan. Program Zero Sampah merupakan sebagai salah satu bentuk strategi pemerintah untuk meminimalisir terjadinya penumpukan sampah yang akan bernilai ekonomis dan baru direalisasikan pada bulan Mei 2023 . Melalui proses pemisahan sampah rumah tangga yang beragam untuk dibungkus oleh warga dan lalu di bawa ke kantor DLHK yang berada di Jl Kartini, Kelurahan Pekkabata Kecamatan Polewali untuk kemudian diterima dan ditimbang oleh petugas Bank Sampah Sipamandaq Polman.

Hal tersebut juga sejalan dengan wawancara yang disampaikan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan

Kehutanan Kabupaten Polewali Mandar yang mengatakan bahwa Sehubungan dengan strategi pengelolaan persampahan, bulan Mei 2023 kemarin kami menjalankan program Zero Sampah yaitu menukar sampah dengan barang yang bernilai ekonomis seperti uang atau Sembako di bank sampah di bawah naungan DLHK. Baru berjalan satu bulan sudah banyak antusias warga dengan mengikuti program tersebut. dan perlahan persampahan di polewali kami harap bisa berkurang volumenya. program ini juga megajarkan masyarakat untuk memilah sampahnya. Sekarang kami sedang gencar-gencarnya melaksanakan sosialisasi agar bank sampah unit yang tersebar di Kabupaten Polewali mandar juga dapat melaksanakan program tersebut.

Kebijakan

Kebijakan yang memiliki indikator visi dan misi organisasi. Dalam melaksanakan tugas Visi memberikan pemahaman tentang ke mana organisasi menuju, apa yang ingin dicapai, dan bagaimana organisasi ingin dilihat dan misi memberikan tujuan, ruang lingkup, fokus utama, dan alasan eksistensi organisasi. Meningkatnya timbulan sampah di Kabupaten Polewali Mandar setelah penutupan TPA Desa Amola merupakan sebuah tantangan serius dalam mewujudkan visi RPJMD Kabupaten Polewali Mandar tahun 2021-2024, yaitu "Rakyat Sejahtera". Hal ini menunjukkan perlunya upaya yang lebih besar untuk mencapai kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan sampah yang berkelanjutan dan efektif. Diperlukan langkah-langkah strategis seperti pengembangan infrastruktur pengelolaan sampah yang modern, program-program edukasi dan sosialisasi yang lebih luas, serta penguatan kerjasama antara pemerintah daerah, masyarakat, dan pihak terkait lainnya. Dengan demikian, meskipun menghadapi tantangan dalam pengelolaan sampah, Kabupaten Polewali Mandar dapat tetap bergerak maju menuju terwujudnya visi "Rakyat Sejahtera" dengan lingkungan yang bersih dan sehat. Program bank sampah "zero sampah" sebagai bagian dari kebijakan DLHK terkait bertujuan untuk mendorong masyarakat untuk menukarkan sampah dengan barang bernilai sebagai insentif. Melalui program ini, masyarakat diajak untuk memisahkan sampah secara benar, yang kemudian ditukar dengan barang-barang seperti voucher belanja atau produk lainnya. Dengan demikian, program ini tidak hanya mengurangi jumlah sampah yang masuk ke tempat pembuangan akhir, tetapi juga mengubah paradigma sampah menjadi sumber daya yang bernilai.

Hal tersebut juga sejalan dengan wawancara yang disampaikan oleh Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Polewali Mandar yang menyatakan bahwa mengenai bagaimana cara mengukur kinerja dari organisasi terutama dalam pengelolaan sampah kami menggunakan beberapa indikator yang membantu seperti, melihat bagaimana tingkat pengurangan sampah. tingkat daur ulang dari sampah, tingkat pengurangan sampah plastik, dan partisipasi masyarakat dalam mendukung program DLHK khususnya salah satu program penanggulangan sampah yaitu Zero Sampah.

Sumber Daya Manusia yang memiliki indikator kualitas karyawan dan inovasi.

Pada Program Zero Sampah yang diperkenalkan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Kabupaten Polewali Mandar tidak terlepas dari dukungan aparatur dan karyawan DLHK yang berperan penting dalam implementasi dan keberlanjutan program tersebut. Aparatur dan karyawan DLHK berfungsi sebagai tulang punggung dalam menjalankan program tersebut, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan terhadap setiap tahapan program. Mereka memiliki peran dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat, pengelolaan infrastruktur yang diperlukan, serta pengawasan terhadap pelaksanaan program secara efektif dan efisien. Dukungan dan komitmen aparatur karyawan DLHK sangatlah vital dalam memastikan keberhasilan program Zero

Sampah dan pengelolaan sampah secara keseluruhan di Kabupaten Polewali Mandar.

Hal ini sejalan dengan wawancara dengan yang disampaikan oleh Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Polewali Mandar yang menyatakan bahwa kami mengadakan ukuran kinerja pada pegawai guna untuk memberikan motivasi agar selalu menjalankan tugas dan fungsinya dengan sebaik baiknya, serta memenuhi standar yang telah ditetapkan di DLHK Kab Polman dalam melakukan pengelolaan sampah. Kami menilai hal tersebut dari berbagai aspek yang dipertimbangkan, misalnya pelanggan atau masyarakat apakah mendapatkan kepuasan atau tidak, terkait efektif dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas, kinerja keuangan, kualitas produk, dan mengenai sumber daya manusia terkait tingkat kehadiran dan sebagainya.

Sistem Informasi Manajemen yang memiliki indikator pengelolaan data base.

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) memanfaatkan sistem informasi manajemen dalam pengelolaan operasional sehari-hari terkait sampah. Melalui sistem yang tersebut, DLHK dapat memantau dan mengelola seluruh siklus hidup sampah, mulai dari pengumpulan hingga pembuangan akhir, dengan lebih efisien dan efektif. Sistem ini memungkinkan DLHK untuk melacak volume sampah yang terkumpul, mendistribusikan sumber daya dengan lebih baik, dan merencanakan kegiatan pengelolaan sampah secara tepat waktu. Selain itu, sistem informasi manajemen juga memfasilitasi pelaporan dan analisis data yang komprehensif, membantu DLHK dalam mengidentifikasi tren, mengevaluasi kinerja, dan membuat keputusan strategis untuk perbaikan berkelanjutan dalam pengelolaan sampah. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengumpulkan dan menyimpan data terkait pengelolaan sampah di dalam database mereka dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Langkah-langkah tersebut meliputi pengumpulan data melalui berbagai metode, pemanfaatan teknologi untuk efisiensi pengumpulan data, pengolahan dan penyimpanan data dalam database terpusat, serta pemeliharaan dan keamanan data. Dengan demikian, DLHK dapat memiliki akses ke informasi yang akurat dan terperinci tentang pengelolaan sampah di wilayahnya, yang dapat digunakan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan dan perencanaan strategis dalam menjaga kebersihan lingkungan dan kesehatan masyarakat.

Hal ini sejalan dengan wawancara yang disampaikan oleh Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yang menyatakan bahwa mengenai memanfaatkan sistem informasi manajemen dalam pengelolaan operasional sehari-hari terkait sampah kami di DLHK menerapkan pengumpulan pencatatan data terlebih dahulu kemudian data yang terkumpulkan di analisis untuk perencanaan dengan sistem informasi selain itu kami di DLHK juga memiliki website kantor yang dapat memudahkan penyaluran informasi untuk masyarakat.

Dari hasil wawancara dan sesuai dengan observasi yang telah dilakukan maka diartikan bahwasanya dalam penerapan sistem informasi yang di lakukan DLHK sudah memudahkan masyarakat dalam mencari informasi tentang aktivitas yang dilaksanakan oleh Aparatur dan karyawan DLHK, karena data ataupun informasi yang diberikan melalui website <https://dinaslingkunganhidup.polkab.go.id/> sehingga masyarakat dapat melihat kinerja dari instansi tersebut dan dapat memberikan penilaian sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat tentang penanganan persampahan.

Sarana prasarana yang memiliki indikator Infrastruktur dan Pemeliharaan

Pengelolaan sampah oleh DLHK Kabupaten Polewali Mandar tidak terlepas dengan penggunaan sarana dan prasarana yang di imbangi dengan penggunaan teknologi dalam penyelenggaraannya. Volume timbulan sampah setiap harinya 40 ton, untuk meningkatkan Volume pengangkutan sampah ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dan TPS (Tempat Pembuangan

Sementara) pada Tahun Anggaran 2023 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Polewali Mandar telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp.8.840.470.967,- untuk pengelolaan penanganan persampahan yang ada di Kabupaten Polewali Mandar. Kabupaten Polewali Mandar memiliki Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) yang berlokasi di Kecamatan Binuang dengan luas sebesar 5 Ha. Tahun 2023 target proporsi sampah yang tertangani sebesar 99,04% sedangkan realisasinya sebesar 12,68%. Penurunan ini secara signifikan diakibatkan oleh masih tertutupnya Tempat Pemrosesan Akhir sampah yang mengakibatkan tidak terkelolanya dengan baik sampah dan mengakibatkan jumlah sampah yang tertangani menurun namun tidak lepas dari peran aktif dan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan persampahan yang semakin meningkat dan juga sarana/ prasarana dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Polewali Mandar setiap tahunnya mengalami peningkatan.

Hal ini sejalan dengan wawancara dengan yang disampaikan oleh Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yang menyatakan bahwa tentu kami semua yang ada di DLHK kewalahan dengan timbulan sampah akibat ditutupnya TPA, namun kami tetap mengoptimalkan pelayanan persampahan dan membuat program yang dapat membantu mengolah sampahnya sendiri Melalui tempat pembuangan sementara (TPS), armada pengangkutan sampah yang memadai, fasilitas pengelolaan sampah, bank sampah, serta sistem informasi dan monitoring yang baik, DLHK dapat meningkatkan efisiensi dalam seluruh rantai pengelolaan sampah. Dengan demikian, pengelolaan sampah dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien, yang pada akhirnya akan mendukung upaya menjaga kebersihan lingkungan dan kesehatan masyarakat di Kabupaten Polewali Mandar.

Discussion

Implikasi dari permasalahan sampah akan berdampak pada masyarakat khususnya yang berada di wilayah Kabupaten Polewali Mandar sehingga diperlukan cara agar untuk mengatasinya. Untuk itu diperlukan kinerja dari DLHK dalam mengatasi permasalahan tersebut. Pembahasan dalam analisis ini akan diuraikan berbagai dimensi yang terdiri dalam beberapa indikator yang berkontribusi pada kinerja DLHK Kabupaten Polewali Mandar melalui program "zero sampah" yaitu tujuan, sasaran, dan strategi yang termuat dalam dimensi organisasi; visi dan misi yang termuat dalam dimensi kebijakan; kualitas karyawan dan inovasi yang termuat dalam dimensi Sumber Daya Manusia; pengelolaan data base yang termuat dalam dimensi Sistem Informasi Manajemen serta infrastruktur dan pemeliharaan yang termuat dalam dimensi sarana prasarana.

Pendekatan "zero sampah" dalam pengurangan sampah yang dilaksanakan oleh DLHK Kabupaten Polewali Mandar merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengurangi timbulan sampah di Kabupaten Polewali Mandar sebagai organisasi yang bertanggung jawab terhadap permasalahan sampah tersebut. Organisasi merupakan pelaksana dalam proses pengurangan sampah di Kabupaten Polewali Mandar yang dalam hal ini dilaksanakan oleh DLHK.

Dalam pelaksanaan tugasnya DLHK tentunya harus mempunyai tujuan yang jelas sebab tujuan organisasi berfungsi untuk memberikan arah masa depan dan sebagai pedoman landasan kegiatan organisasi agar dapat berubah menjadi lebih baik (Aliefiani Mulya Putri et al., 2022). Dalam pelaksanaan tujuan organisasi perlu diuraikan tugas-tugas yang menjadi sasaran kerja dalam organisasi. Sasaran kerja berfungsi sebagai uraian tugas yang mampu meningkatkan kinerja karna didalamnya terjadi penjabaran wewenang, tanggung jawab dan standar hasil kerja yang akan dicapai sehingga memenuhi sasaran yang telah ditetapkan (Suryani et al., 2018). Selain tujuan dan sasaran, penting untuk memperhatikan strategi yang berperan dalam penyempurnaan program dan dapat menjadi alat dalam memecahkan persoalan organisasi sehingga berdampak pada pengembangan organisasi (Raharja, 2016).

Kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan (Akib,

2012). Dalam pelaksanaan kebijakan DLHK dilaksanakan berdasarkan visi dan misi organisasi. Kebijakan dibuat untuk diimplementasikan, dalam mengukur keberhasilan dari implementasi kebijakan didasarkan pada tiga aspek yaitu tingkat kepatuhan birokrasi, kelancaran dalam rutinitas pelaksanaan, dan dampak yang dikehendaki dari program yang ditetapkan dapat dirasakan oleh seluruh pihak (Simatupang & Haedar, 2011).

Program “zero sampah” merupakan bagian dari implementasi kebijakan yang bertujuan untuk mengurangi timbulan sampah di Kabupaten Polewali Mandar. Implementasi kebijakan tersebut adalah implikasi dari perubahan RPJMD Kabupaten Polewali Mandar tahun 2019-2024 dengan salah satu misi RPJMD yaitu “ Mengembangkan infrastruktur berkualitas dan terintegrasi dengan berwawasan lingkungan”. Harapan dari implementasi kebijakan tersebut yaitu dapat mengurangi serta meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam mengurangi timbulan sampah di Kabupaten Polewali Mandar.

Dalam pelaksanaan program “zero sampah” diperlukan Sumber Daya Manusia (SDM) yang optimal. SDM berperan dalam penting dalam menentukan keberhasilan dari implementasi kebijakan (Meflinda & Mahyarni Astuti, 2011). Pelaksanaan kebijakan harus dilaksanakan oleh SDM yang berkualitas. Dalam beberapa penelitian menunjukkan bahwa kualitas karyawan akan mempengaruhi kualitas pelayanan yang diberikan serta akan mempengaruhi efektifitas kerja dan kinerja karyawan (Ananda Lubis et al., 2019; Prilly et al., 2020).

Kualitas SDM merupakan komponen penting dalam implementasi kebijakan sehingga penting untuk memperhatikan aspek kualitas SDM yang menjadi pelaksanaan kebijakan. Selain itu, indikator SDM yang berkualitas dapat dilihat berdasarkan inovasi yang diberikan dalam implementasi kebijakan. Inovasi SDM akan memberikan pengaruh positif terhadap kinerja sehingga berdampak pada kualitas layanan yang meningkat (Dewi & Wibawa, 2022). Lebih lanjut penelitian oleh Margaretha et al (2023) menunjukkan bahwa inovasi SDM secara personal akan dapat memberikan kesiapan dalam menghadapi tantangan di era globalisasi dan revolusi teknologi sehingga dapat bertahan terhadap perkembangan zaman.

Perkembangan zaman erat kaitannya dengan perkembangan informasi sehingga dalam implementasi kebijakan perlu untuk memperhatikan jaringan informasi yang tersusun dalam suatu manajemen sistem informasi yang terhubung antara pimpinan sebagai pengambil kebijakan dan SDM sebagai pelaksana kebijakan. Sistem informasi manajemen yang tepat akan menghasilkan informasi yang valid dan akan mempengaruhi pengambilan keputusan. Informasi yang diterima akan menghasilkan keputusan yang lebih baik (Sudjiman, Paul Eduard Sudjiman, 2018).

Sistem informasi manajemen terhubung melalui suatu sistem data yang terintegrasi. Integrasi data tersebut termuat dalam database yang menyimpan berbagai data dan saling terhubung yang disimpan bersama media tertentu, tanpa tumpang tindih atau memerlukan struktur data khusus, sehingga memungkinkan untuk mengambil dan menggunakan data dengan mudah. Data base memiliki pengaruh penting terhadap sistem informasi manajemen. Pengelolaan data base berkontribusi terhadap pengambilan keputusan (Syahputri et al., 2023), sehingga dapat diartikan bahwa pengelolaan data yang berkualitas akan memberikan keputusan yang berkualitas.

Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian penulis yang menunjukkan bahwa DLHK dapat memantau dan mengelola seluruh siklus hidup sampah, mulai dari pengumpulan hingga pembuangan akhir, dengan lebih efisien dan efektif. Sistem ini memungkinkan DLHK untuk melacak volume sampah yang terkumpul, mendistribusikan sumber daya dengan lebih baik, dan merencanakan kegiatan pengelolaan sampah secara tepat waktu.

Dalam pelaksanaan program “zero sampah” tidak terlepas dari saran dan prasarana pendukung. Implementasi kebijakan banyak dipengaruhi oleh sarana dan prasarana yang didalamnya

termasuk infrastruktur dan pemeliharaan terhadap infrastruktur tersebut. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa infrastruktur kebersihan yang memadai menjadi faktor pendukung dalam pelaksanaan kebijakan kebersihan sebaliknya jika infrastruktur kebersihan kurang memadai maka akan menjadi faktor penghambat dalam implementasi kebijakan kebersihan (Ernawati, 2018; Setyawati & Purnaweni, 2014; Tria Vilian & Minsih, 2021).

Dalam melihat kinerja DLHK dalam implementasi kebijakan program “zero sampah” di Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat merupakan upaya sistematis yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengurangi timbulan sampah di Kabupaten Polewali Mandar. Upaya sistematis dalam mengurangi timbulan sampah tersebut akan memberikan implikasi positif terhadap masyarakat sehingga dampak buruk yang akan terjadi akibat timbulan sampah dapat diminimalisir atau dicegah. Selain itu, program “zero sampah” yang diinisiasi oleh DLHK Kabupaten Polewali Mandar merupakan wujud upaya untuk membantu masyarakat dengan cara menukar sampah daur ulang dengan Sembilan bahan pokok (sembako) yang akan membantu perekonomian masyarakat khususnya masyarakat yang berada dibawah garis kemiskinan.

Limitation Of The Study

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik wawancara sebagai metode utama pengumpulan data. Sehingga belum mampu memprediksi dimensi dan indikator apa yang paling mempengaruhi dalam mengukur kinerja dinas lingkungan hidup dan kehutanan melalui program “zero sampah” di Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat.

Kedua, penelitian ini dilakukan dalam waktu singkat sehingga membatasi dalam waktu pengumpulan data. Pelaksanaan wawancara yang dilakukan secara singkat diduga akan memberikan informasi yang terbatas dan memungkinkan banyaknya informasi yang belum terungkap. Selain itu wawancara yang dilakukan bersifat subjektif bergantung pada ingatan dan persepsi informan sehingga mempengaruhi akurasi dan reliabilitas data. Sehingga penting untuk dilakukan analisis kuantitatif pada penelitian selanjutnya.

Ketiga, penelitian ini belum menjelaskan faktor-faktor lain yang mempengaruhi kinerja seperti peran kepemimpinan wilayah seperti camat dan lurah yang berpotensi mempengaruhi masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan. Asas tampong tantra juga perlu dianalisis meskipun DLHK sebagai organisasi yang bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan fungsi terutama kebersihan tetapi peran kecamatan sampai ditingkat desa juga diindikasikan berperan dalam mengambil alih tugas dan tanggung jawab tersebut.

Dengan melihat keterbatasan-keterbatasan penelitian tersebut, arah masa depan penelitian ini yaitu dapat dilakukan uji kuantitatif dan melihat lebih jauh faktor-faktor lain yang mempengaruhi kinerja DLHK dalam pelaksanaan program “zero sampah” di Kabupaten Polewali Mandar.

Conclusions and Recommendations

Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Polewali Mandar dalam mengelola sampah melalui program “Zero Sampah” telah berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemilahan sampah dan praktik daur ulang. Temuan menunjukkan bahwa tujuan, sasaran, dan strategi yang termuat dalam dimensi organisasi; visi dan misi yang termuat dalam dimensi kebijakan; kualitas karyawan dan inovasi yang termuat dalam dimensi Sumber Daya Manusia; pengelolaan data base yang termuat dalam dimensi Sistem Informasi Manajemen serta infrastruktur dan pemeliharaan yang termuat dalam dimensi sarana prasarana memiliki keterkaitan dalam kesuksesan program “zero sampah” di Kabupaten Polewali Mandar.

Dampak yang diharapkan dari program “zero sampah” di Kabupaten Polewali Mandar bukan hanya tentang kebersihan namun lebih jauh berkaitan dengan bentuk perhatian

pemerintah terhadap masyarakat dengan wujud upaya untuk membantu masyarakat dengan cara menukar sampah daur ulang dengan Sembilan bahan pokok (sembako) yang akan membantu perekonomian masyarakat khususnya masyarakat yang berada dibawah garis kemiskinan. Tentu nya hal tersebut akan memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat.

References

- Akib, H. (2012). Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa dan Bagaimana. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik*, 1(1). <https://doi.org/10.26858/jiap.v1i1.289>
- Aliefiani Mulya Putri, G., Putri Maharani, S., & Nisrina, G. (2022). LITERATURE VIEW PENGORGANISASIAN: SDM, TUJUAN ORGANISASI DAN STRUKTUR ORGANISASI. *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, 3(3). <https://doi.org/10.31933/jemsi.v3i3.819>
- Ananda Lubis, F. R., Junaidi, J., Lubis, Y., & Lubis, S. (2019). Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia (Sdm) Terhadap Efektifitas Kerja Dan Implikasinya Terhadap Kinerja Karyawan Pelaksana Di Pt. Perkebunan Nusantara Ii (Persero). *Jurnal Agrica*, 12(2). <https://doi.org/10.31289/agrica.v12i2.2866>
- Asyharuddin, M. (2023). Warga Polman Tukar Sampah dengan Sembako. *Berita Satu*. <https://www.beritasatu.com/nusantara/1047369/warga-polman-tukar-sampah-dengan-sembako>
- Dewi, N. K., & Wibawa, I. M. A. (2022). Pengaruh Inovasi Dan Employee Creativity Terhadap Kinerja Karyawan Pada Industri Percetakan Di Kabupaten Tabanan. *E-Jurnal Manajemen*, 11(1)(2).
- Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Polewali Mandar
- Ernawati. (2018). Efektivitas Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Pekan Baru. *JOM Fisip*, 5(1).
- Margaretha, G. I. E., Ivan, G. S., Elizabeth, R., Hutabarat, R., Soeyono, A., G. R. E., Notosudjono, D., Hardiyanto, A. T., Bustomi, H., Sasongko, H., Muharam, H., & Tukiran, M. (2023). Peran Inovasi Dan Strategik Manajemen Mendukung Kesiapan Sdm Memasuki Dunia Kerja Dan Usaha Di Era Globalisasi – Revolusi Teknologi 4.0. *Mimbar Agribisnis : Jurnal Pemikiran Masyarakat Ilmiah Berwawasan Agribisnis*, 9(1). <https://doi.org/10.25157/ma.v9i1.9287>
- Meflinda, A., & Mahyarni Astuti, M. M. (2011). Peran Strategis Manajemen Sumber Daya Manusia Dalam Meningkatkan Produktivitas Kerja Karyawan. *Anida*, Vol 36, No 1 (2011): Januari-Juni 2011, 23–36. <http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/Anida/article/view/292>
- Nogi, H. (2005). *Manajemen Publik*. PT. Grasindo.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri. 2020. *Tentang Pedoman Pengelolaan Sampah*.
- Perubahan RPJMD 2019-2024 Kabupaten Polewali Mandar
- Prilly, N. N., Sari, R. M., & Aprilia, T. R. (2020). Analisis Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan di Indonesia. *FKM UI*, December.
- Raharja, I. (2016). Strategi Pengembangan Organisasi dalam Upaya Peningkatan Kinerja Pegawai BAPPEDA Tingkat 1 Jawa Tengah. *Jurnal Administrasi Kantor*, 4(2).
- Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Polewali Mandar 2019-2023.
- Setyawati, D. A., & Purnaweni, H. (2014). Implementasi kebijakan kerjasama pemerintah dengan swasta (public private partnership) dalam pengelolaan sampah di TPA Jatibarang. *E-Jurnal Katalogis*, 2.
- Simatupang, P., & Haedar, A. (2011). Efektivitas Implementasi dan Dampak Kebijakan dalam Konteks Desentralisasi Pemerintahan. *Jurnal Administrasi Publik*, 2(1).
- SIPSN. (2022). *Data Timbulan Sampah Indonesia*. KEMENTERIAN LINGKUNGA HIDUP DAN KEHUTANAN. <https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/public/data/timbulan>
- Sudjiman, Paul Eduard Sudjiman, L. S. (2018). Analisis Sistem Informasi Manajemen Berbasis Komputer dalam Proses Pengambilan Keputusan. *Jurnal TelKa Vlo.8 Nomor 2*, 8.
- Suryani, I. M., Sulistyanningrum, D. C., & Murwaningsih, T. (2018). Analisis Penerapan Job Description Pegawai (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta Kelas IA Khusus). *Jurnal Informasi Dan Komunikasi Administrasi Perkantoran*, 2(5).
- Syahputri, K., Irwan, M., & Nasution, P. (2023). Peran Database Dalam Sistem Informasi Manajemen. *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Bisnis*, 1(2).
- Tria Vilian, M., & Minsih. (2021). BUDAYA SEKOLAH DALAM MEWUJUDKAN SEKOLAH SEHAT NASIONAL DI SD MUHAMMADIYAH 1 KETELAN SURAKARTA. *Jurnal Pendidikan Dasar Flobamorata*, 2(1). <https://doi.org/10.51494/jpdf.v2i1.419>
- Raharja, I. (2016). Strategi Pengembangan Organisasi dalam Upaya Peningkatan Kinerja Pegawai BAPPEDA Tingkat 1 Jawa Tengah. *Jurnal Administrasi Kantor*, 4(2).
- Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Polewali Mandar 2019-2023.
- Setyawati, D. A., & Purnaweni, H. (2014). Implementasi kebijakan kerjasama pemerintah dengan swasta (public private partnership) dalam pengelolaan sampah di TPA Jatibarang. *E-Jurnal Katalogis*, 2.
- Simatupang, P., & Haedar, A. (2011). Efektivitas Implementasi dan Dampak Kebijakan dalam Konteks Desentralisasi Pemerintahan. *Jurnal Administrasi Publik*, 2(1).
- SIPSN. (2022). *Data Timbulan Sampah Indonesia*. KEMENTERIAN LINGKUNGA HIDUP DAN KEHUTANAN. <https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/public/data/timbulan>
- Sudjiman, Paul Eduard Sudjiman, L. S. (2018). Analisis Sistem Informasi Manajemen Berbasis Komputer dalam Proses Pengambilan Keputusan. *Jurnal TelKa Vlo.8 Nomor 2*, 8.
- Suryani, I. M., Sulistyanningrum, D. C., & Murwaningsih, T. (2018). Analisis Penerapan Job Description Pegawai (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta Kelas IA Khusus). *Jurnal Informasi Dan Komunikasi Administrasi Perkantoran*, 2(5).
- Syahputri, K., Irwan, M., & Nasution, P. (2023). Peran Database Dalam Sistem Informasi Manajemen. *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Bisnis*, 1(2).
- Tria Vilian, M., & Minsih. (2021). BUDAYA SEKOLAH DALAM MEWUJUDKAN SEKOLAH SEHAT NASIONAL DI SD MUHAMMADIYAH 1 KETELAN SURAKARTA. *Jurnal Pendidikan Dasar Flobamorata*, 2(1). <https://doi.org/10.51494/jpdf.v2i1.419>